
CULTURAL VIEWS ON DISABILITY BEFORE AND AFTER ACCESSIBILITY FULFILLMENT BY YEU PANDANGAN BUDAYA TERHADAP DISABILITAS SEBELUM DAN SESUDAH PEMENUHAN AKSESIBILITAS OLEH YEU

Dwi Rahayu Nurmiati¹, Nurliana Cipta Apsari², Budi Muhammad Taftazani³

^{1,2,3}Universitas Padjadjaran

dwi23018@mail.unpad.ac.id¹, nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id²,
budimtunpad@gmail.com³

ABSTRACT; *From a cultural perspective, disability is often seen as an inherent physical or mental trait rather than a measure of status or capability. Accessibility for disabilities focuses on the availability and suitability of supportive facilities. The Yakkum Emergency Unit (YEU), a non-governmental organization focused on disaster response, also provides for vulnerable groups, including people with physical disabilities. One of its programs is household-level accessibility, offering emergency lights, handrails, ramps, and bathroom modifications. This research aims to identify cultural views on physical disability before and after accessibility support from YEU. It examines societal views on disability, comparing stigmas, perceptions, and responses before and after YEU's intervention, to see if attitudes have shifted. Using qualitative methods, this study explores these cultural aspects through data reduction and conclusion techniques. Initial findings show that prior to intervention, stigma and negative perceptions were common, but after accessibility improvements, social acceptance and inclusion of individuals with physical disabilities have increased. YEU's efforts in Ciputri Village significantly improve the quality of life for these individuals, demonstrating the positive impact of accessible infrastructure on community integration.*

Keywords: *Cultural Perspectives; Physical Disabilities; Accessibility Provision; YAKKUM Emergency Unit; Community Perception.*

ABSTRAK; *Dari perspektif budaya, disabilitas sering dianggap sebagai karakteristik fisik atau mental yang melekat, bukan sebagai ukuran status atau kemampuan. Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas berfokus pada ketersediaan dan kesesuaian fasilitas yang mendukung. Yakkum Emergency Unit (YEU), sebuah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada penanggulangan bencana, juga memberikan dukungan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas fisik. Salah satu programnya adalah aksesibilitas tingkat rumah tangga, dengan menyediakan lampu darurat, pegangan tangan, ramp, dan modifikasi kamar mandi. Penelitian ini bertujuan*

mengidentifikasi pandangan budaya terhadap disabilitas fisik sebelum dan setelah dukungan aksesibilitas dari YEU. Studi ini membandingkan pandangan masyarakat tentang disabilitas, mulai dari stigma, persepsi, hingga respon sebelum dan sesudah intervensi YEU, untuk melihat apakah ada perubahan sikap. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi aspek budaya melalui teknik reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil awal menunjukkan bahwa sebelum intervensi, stigma dan persepsi negatif umum terjadi, namun setelah peningkatan aksesibilitas, penerimaan sosial dan inklusi bagi individu dengan disabilitas fisik meningkat. Upaya YEU di Desa Ciputri secara signifikan meningkatkan kualitas hidup mereka, menunjukkan dampak positif dari infrastruktur aksesibilitas terhadap integrasi dalam masyarakat.

Kata Kunci: Pandangan Budaya; Disabilitas Fisik; Pemenuhan Aksesibilitas; YAKKUM *Emergency Unit*; Persepsi Masyarakat.

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas akan terus menghadapi keterbatasan karena pandangan masyarakat terhadap mereka yang masih terus dipandang negatif. (Oliver, 1996) dalam (Muhammad Fadhil Al Faiq, 2021) pemikiran yang dikemukakan oleh Oliver (1996) tentang pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, Oliver menggambarkan bahwa penyandang disabilitas terus mengalami keterbatasan karena adanya stigma atau diskriminasi dari masyarakat yang disebabkan oleh persepsi negatif terhadap disabilitas. Artinya, pandangan atau sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam memungkinkan individu tersebut untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan sosial, dan budaya. Penting untuk mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi mereka. Dengan memahami bahwa keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas tidak semata-mata berasal dari kondisi fisik atau mental mereka, tetapi juga dari sikap dan tindakan masyarakat terhadap mereka, maka langkah-langkah untuk memperbaiki aksesibilitas, menghilangkan stigma, dan mendorong inklusi dapat diambil.

Budaya dan nilai-nilai masyarakat mempengaruhi persepsi dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas. Terkadang, mereka dipandang sebagai beban oleh masyarakat, bahkan oleh anggota keluarga mereka sendiri dalam beberapa kasus. (Abdussamad et al., 2023). Budaya dan nilai-nilai masyarakat turut membentuk cara pandang dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas. Dalam beberapa situasi, mereka sering dianggap

sebagai beban oleh masyarakat, bahkan oleh keluarga mereka sendiri. Budaya yang tertanam dalam suatu masyarakat juga dapat membentuk norma, stereotip, dan persepsi terhadap individu dengan disabilitas. Pada beberapa kasus, pandangan tersebut menimbulkan stigma yang membuat penyandang disabilitas dipandang sebagai beban, baik oleh masyarakat secara umum maupun oleh keluarga mereka sendiri. Ketika budaya masyarakat menekankan nilai-nilai seperti produktivitas, kekuatan fisik, atau sempurna, individu dengan disabilitas dapat dianggap tidak sesuai dengan standar tersebut dan dianggap sebagai beban. Bahkan, di beberapa keluarga, terutama yang didasarkan pada budaya yang menekankan pentingnya kontribusi ekonomi atau peran tradisional tertentu, penyandang disabilitas bisa dianggap sebagai tanggungan yang membebani. Akibatnya, pandangan negatif ini dapat mengakibatkan perlakuan diskriminatif, pemisahan sosial, atau bahkan penolakan terhadap penyandang disabilitas, baik secara individu maupun secara sistemik dalam kebijakan dan praktik sosial. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan upaya untuk mengubah pandangan masyarakat tentang disabilitas dengan mempromosikan inklusi, kesetaraan, dan empati. Pendidikan dan peningkatan kesadaran kebijakan publik yang mendukung serta memfasilitasi partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam masyarakat dapat berperan dalam mengurangi stigma dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh empati bagi mereka.

Menurut sudut pandang budaya, penyandang disabilitas sering dilihat sebagai karakteristik fisik atau mental yang melekat pada individu, bukan sebagai indikator status atau kapabilitas mereka. (Goffman, 1963; Oliver, 1996). Pandangan kultural tentang disabilitas sering kali menciptakan hambatan besar bagi upaya mencapai kemandirian bagi penyandang disabilitas. Ini dapat dijelaskan melalui beberapa perspektif. Pertama perspektif stigma dan diskriminasi. Budaya dapat menciptakan stigma terhadap penyandang disabilitas, menganggap mereka sebagai individu yang kurang mampu atau bahkan tidak berguna dalam masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk interaksi sosial. Kedua Persepsi Keterbatasan, Budaya yang tidak memahami atau menerima keberagaman fisik dan mental cenderung melihat disabilitas sebagai keterbatasan yang tidak dapat diatasi. Pandangan ini dapat menghambat upaya untuk memberdayakan penyandang disabilitas serta mendorong mereka untuk mencapai potensi maksimal mereka. Ketiga kurangnya aksesibilitas, budaya yang tidak memperhatikan kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dapat secara langsung menghambat kemampuan mereka untuk menjadi

mandiri. Ini mencakup akses terhadap bangunan yang dibutuhkan untuk hidup secara independen. Keempat, norma-norma sosial Norma-norma sosial dalam budaya tertentu sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan atau perspektif penyandang disabilitas. Misalnya, harapan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tertentu atau memenuhi standar tertentu dapat menjadi hambatan bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental. Terakhir kekuatan struktural, sistem sosial dan politik dalam suatu budaya dapat memperkuat atau menghambat kemandirian penyandang disabilitas. Ketika kebijakan, regulasi, atau praktik-praktik institusional tidak memperhitungkan kebutuhan mereka, hal itu dapat menghambat kemampuan mereka untuk hidup secara mandiri. Secara keseluruhan, pandangan kultural yang kurang inklusif dan pemahaman yang terbatas tentang disabilitas dapat menjadi hambatan besar bagi upaya mencapai kemandirian bagi penyandang disabilitas. Diperlukan perubahan budaya yang lebih inklusif, pemahaman yang lebih dalam tentang keberagaman manusia, serta kebijakan dan praktik yang mendukung partisipasi penuh dan kemandirian bagi individu dengan disabilitas. Pentingnya aksesibilitas sangatlah jelas dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas fisik.

Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas diprioritaskan melalui penyediaan fasilitas yang layak dan ramah bagi mereka (Mumpuni & Zainudin, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mumpuni dan Zainudin pada tahun 2018, aksesibilitas di lingkungan rumah sangat penting untuk mendukung individu dengan disabilitas. Aksesibilitas ini mencakup kemudahan yang dirancang khusus bagi penyandang disabilitas sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan dengan masyarakat pada umumnya dalam berbagai aspek kehidupan (Pasciana, 2020). Tujuan dari penyediaan aksesibilitas adalah untuk mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat.

Aksesibilitas di tingkat rumah tangga sangat penting untuk menentukan kualitas hidup, terutama di pedesaan, dengan mempertimbangkan lokasi tempat tinggal, fasilitas, dan sistem transportasi yang menghubungkan keduanya (Luvitaliani, 2022). Pertama, aksesibilitas rumah tangga mendukung kemandirian dan kualitas hidup penyandang disabilitas, dengan menyediakan fasilitas dasar yang mudah diakses, seperti kamar mandi yang ramah disabilitas atau pintu yang cukup lebar. Kedua, aksesibilitas yang baik memungkinkan penyandang disabilitas berpartisipasi dalam keluarga dan komunitas,

menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung interaksi setara. Selain itu, aksesibilitas yang memadai berperan penting bagi kesehatan mental dan emosional mereka, meningkatkan kenyamanan dan mengurangi stres. Memastikan aksesibilitas tingkat rumah tangga membantu penyandang disabilitas hidup secara mandiri dan bermartabat, mendukung kesejahteraan menyeluruh, serta memajukan kesetaraan dan inklusi di masyarakat.

Yakkum Emergency Unit (YEU) adalah organisasi non-pemerintah yang fokus pada tanggap darurat bencana. YEU juga memiliki mandat untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan, termasuk di antaranya adalah penyandang disabilitas fisik. Ketika terjadi gempa di Cianjur pada November 2022, setelah memberikan respons tanggap darurat dan mulai pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, YEU merancang program untuk mendukung perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas fisik. Salah satu program yang dirancang adalah untuk pemberian aksesibilitas tingkat rumah tangga bagi penyandang disabilitas fisik. Hal ini mencakup penyediaan lampu darurat, pemasangan handril, pembuatan jalan landai atau ramps, dan perbaikan kamar mandi. Program ini dilaksanakan di 5 desa yang didampingi oleh YEU, dengan dukungan dari AWO International. Desa yang mendapatkan dukungan aksesibilitas terbanyak adalah Desa Ciputri, Kecamatan Pacet.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi Pandangan Budaya Terhadap Disabilitas Fisik Sebelum dan Sesudah Pemenuhan Aksesibilitas, hal ini menunjukkan perbandingan pandangan masyarakat terhadap disabilitas fisik sebelum dan setelah adanya tindakan pemenuhan aksesibilitas oleh YAKKUM Emergency Unit mencakup evaluasi tentang bagaimana stigma, persepsi, dan penanganan terhadap individu dengan disabilitas fisik berubah atau tidak berubah seiring waktu. Serta mengidentifikasi Pemenuhan Aksesibilitas Oleh YAKKUM Emergency Unit. Fokus pada peran YAKKUM Emergency Unit dalam memenuhi kebutuhan aksesibilitas bagi individu dengan disabilitas fisik di Desa Ciputri. Ini bisa termasuk langkah-langkah konkrit seperti pembangunan aksesibilitas fisik, program sosialisasi dan advokasi. Lokasi penelitian, yaitu Desa Ciputri di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Fokus pada komunitas lokal memberikan konteks penting tentang bagaimana dampak perubahan aksesibilitas dirasakan di tingkat komunitas. Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi dampak konkret dari upaya pemenuhan aksesibilitas oleh YAKKUM Emergency Unit terhadap pandangan budaya terhadap disabilitas fisik di masyarakat

Desa Ciputri sebelum dan setelah intervensi tersebut dilakukan. Ini bisa memberikan wawasan berharga tentang efektivitas program tersebut serta bagaimana perubahan praktis dapat memengaruhi persepsi dan perlakuan terhadap individu dengan disabilitas fisik dalam konteks budaya lokal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian untuk studi dengan judul "Pandangan Budaya Terhadap Disabilitas Sebelum dan Sesudah Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Disabilitas Fisik Oleh YAKKUM Emergency Unit di Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur" dirancang untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pandangan budaya terhadap disabilitas fisik dan bagaimana pengaruh aksesibilitas mempengaruhinya di wilayah tersebut. Karena penelitian ini bertujuan untuk mendalami pandangan budaya, pendekatan kualitatif yang mendalam akan lebih sesuai. Penelitian kualitatif sangat sesuai untuk studi kebudayaan karena metode ini melibatkan teknik pengumpulan data seperti reduksi data dan penarikan kesimpulan. Selain itu, teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi deskripsi kualitatif, deskripsi kualitatif dengan pendekatan kualitatif, serta cara mendeskripsikan data yang diperoleh dari observasi selama proses penelitian berlangsung (Islam et al., 2023). Metode seperti wawancara mendalam, pengamatan partisipatif, dan analisis konten dari dokumen dan materi budaya dapat digunakan. Informan yang dipilih mencakup beragam lapisan masyarakat di Desa Ciputri, termasuk individu dengan disabilitas fisik, anggota keluarga mereka, petugas YAKKUM Emergency Unit, serta tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk Teknik Pengumpulan Data digunakan Wawancara mendalam. Wawancara dengan individu dan kelompok fokus dapat dilakukan untuk mendapatkan berbagai sudut pandang tentang pemenuhan aksesibilitas dan pandangan budaya terkait.

Penelitian ini menerapkan metode Pengamatan Partisipatif, di mana peneliti ikut serta dalam pengamatan langsung di Desa Ciputri, terutama dalam kegiatan atau acara yang melibatkan penyandang disabilitas fisik dan pihak terkait. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang interaksi sosial dan budaya seputar aksesibilitas. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik, dan analisis konten diterapkan pada transkrip wawancara serta materi budaya lainnya untuk mengidentifikasi pola dan tema terkait pandangan budaya tentang aksesibilitas. Untuk memastikan validitas, dilakukan triangulasi dengan berbagai sumber data serta teknik analisis yang

relevan. Eksplorasi pandangan budaya dalam konteks lokal Desa Ciputri ini bertujuan memahami bagaimana nilai, norma, dan praktik budaya khusus memengaruhi pandangan terhadap disabilitas fisik. Dengan pendekatan yang beragam ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai pandangan budaya terhadap disabilitas fisik sebelum dan sesudah adanya pemenuhan aksesibilitas oleh YAKKUM *Emergency Unit* di Desa Ciputri

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sebelum Adanya Dukungan Aksesibilitas

Menurut Gillin dan Gillin (Indraddin, 2016), perubahan sosial adalah transformasi dalam kehidupan manusia yang mencakup perubahan kondisi geografis, budaya material, komposisi penduduk, ideologi, serta penyebaran penemuan baru. Dalam konteks budaya terhadap disabilitas, sebelum dukungan aksesibilitas YAKKUM *Emergency Unit*, masyarakat Desa Ciputri cenderung menyembunyikan penyandang disabilitas dan melihat mereka sebagai objek belas kasih tanpa melibatkan mereka dalam kegiatan sosial.

Perubahan diperlukan untuk mengatasi stigma ini, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dan diakui layak serta diikutsertakan. Pendidikan dan infrastruktur yang ramah terhadap disabilitas, seperti akses fisik dan fasilitas khusus, perlu diperkuat untuk mendukung inklusi sosial. Upaya ini penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, menghargai keberagaman, dan mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Athony Giddens (1979), nilai merujuk pada konsep-konsep yang dipahami oleh individu atau kelompok tentang hal-hal yang diinginkan, pantas, serta baik atau buruk. Menurut John J. Macionis (2009), norma didefinisikan sebagai semua aturan dan harapan dalam masyarakat yang mengatur perilaku para anggotanya. Dalam konteks pandangan budaya terhadap disabilitas fisik, pemahaman tentang nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat memiliki peran yang penting. Pandangan terhadap disabilitas fisik sering kali tercermin dalam nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Nilai-nilai ini dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang dan memperlakukan individu penyandang disabilitas fisik. Melalui identifikasi faktor-faktor tersebut, kita dapat memahami bagaimana pandangan budaya terhadap disabilitas sebelum adanya dukungan

aksesibilitas cenderung dipengaruhi oleh norma, nilai, dan pola perilaku dalam masyarakat yang mendasari stigma dan diskriminasi.

Sebelum adanya dukungan aksesibilitas, masyarakat cenderung memiliki norma-norma sosial yang menekankan pada kesempurnaan fisik dan produktivitas. Individu dengan disabilitas dianggap tidak memenuhi standar ini, sehingga mereka sering kali dianggap sebagai beban atau tidak mampu berkontribusi secara signifikan dalam masyarakat. Sudut pandang nilai budaya, keadaan di Desa Ciputri yang sebelum adanya dukungan aksesibilitas, menyembunyikan keberadaan disabilitas, tidak melibatkan mereka dalam kegiatan kemasyarakatan, dan menjadikan mereka objek belas kasihan, mencerminkan stigma terhadap disabilitas, eksklusi sosial, dan pandangan ketergantungan. Stigma terhadap disabilitas harus diubah agar penyandang disabilitas mendapatkan tempat yang layak di masyarakat dan diperlakukan setara (Widinarsih, 2022). Stigma ini sering membuat mereka merasa harus bersembunyi atau tidak nyaman untuk bersosialisasi karena takut dijauhi. Sebelum adanya dukungan aksesibilitas, pandangan berbasis belas kasihan mendominasi, memandang mereka sebagai objek simpatik daripada individu dengan hak dan potensi yang setara.

Soerjono Soekanto (2019) menjelaskan bahwa stratifikasi sosial merupakan pengelompokan perbedaan kedudukan atau posisi seseorang secara vertikal. Sebelum adanya dukungan aksesibilitas, individu dengan disabilitas sering kali ditempatkan di bagian bawah stratifikasi sosial dalam masyarakat. Mereka mungkin menghadapi diskriminasi dan stigmatisasi karena dianggap sebagai kelompok yang rentan dan kurang mampu berkontribusi secara ekonomi atau sosial. Hal ini dapat menyebabkan penyandang disabilitas merasa malu atau merasa tidak diakui dalam masyarakat. Dalam konteks stratifikasi sosial, individu dengan disabilitas sering kali ditempatkan di lapisan bawah masyarakat, yang berkontribusi pada pandangan budaya bahwa disabilitas merupakan hal yang harus disembunyikan.

Interaksi antara individu, di mana tindakan satu pihak mempengaruhi pihak lain, merupakan bagian penting dari kehidupan sosial (Dan & Sosial, 2018). Komunikasi adalah kunci dalam interaksi sosial, memungkinkan pertukaran informasi dan gagasan (Seputri, 2015). Bagi penyandang disabilitas yang mungkin memiliki kendala bahasa, diperlukan pendekatan khusus untuk memastikan komunikasi berjalan optimal (Hairunisah & Utami, 2023). Interaksi sosial antara individu dengan dan penyandang disabilitas tanpa turut mempengaruhi pandangan budaya terhadap disabilitas sebelum

ada dukungan aksesibilitas. Karena stigma, penyandang disabilitas sering dihindari atau tidak diajak berpartisipasi dalam kegiatan sosial, sehingga merasa terlindungi. Minimnya interaksi ini memperkuat persepsi bahwa disabilitas adalah hal yang harus disembunyikan. Ketidaknyamanan individu tanpa disabilitas dalam berinteraksi juga menambah anggapan bahwa penyandang disabilitas hanyalah objek belas kasihan yang sebaiknya dihindari, mempertegas pandangan negatif

Fuller dan Jacobs, dalam Sunarto (2012: 24), menyatakan bahwa agen sosialisasi adalah entitas yang bertanggung jawab atas proses sosialisasi. Sosialisasi memungkinkan individu memahami pola pikir dan perilaku untuk berpartisipasi dalam masyarakat (Vander, 1979: 75). Keluarga, menurut Purwanto (2009: 80), berperan sebagai agen sosialisasi utama yang pertama kali mempengaruhi pandangan individu terhadap disabilitas. Sebelum adanya dukungan aksesibilitas, keluarga sering memiliki pandangan negatif atau stereotip terhadap disabilitas, seperti kecenderungan adanya anggota keluarga dengan disabilitas karena ketidakpahaman atau ketakutan terhadap hal yang tidak biasa. Hal ini dapat memperkuat stigma dan diskriminasi dalam masyarakat.

Stigma adalah atribut fisik dan sosial yang memiliki konotasi negatif, yang menurunkan nilai identitas sosial dan harga diri individu atau kelompok (Hakim, 2021). Hakim menyebutkan bahwa stigma terhadap penyandang disabilitas muncul karena masyarakat sering mengacu pada konsep 'normalisme', yang memandang disabilitas sebagai ketidaknormalan. Hal ini menyebabkan anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak normal, layak mendapat simpati, dan tidak mampu mandiri. Sementara itu, 'diskriminasi' mengacu pada tindakan diskriminatif yang sengaja dilakukan terhadap kelompok tertentu dengan kepentingan khusus.

Ketika keluarga menyembunyikan anggota penyandang disabilitas, hal ini menunjukkan bahwa stigma terhadap disabilitas masih kuat. Penyembunyian ini mungkin didorong oleh rasa malu atau ketakutan akan diskriminasi masyarakat yang memiliki pandangan negatif. Akibatnya, individu penyandang disabilitas dan keluarganya merasa terlindungi tetapi tidak diakui secara sosial. Selain itu, ketika penyandang disabilitas tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial dan hanya dipandang sebagai objek belas kasihan, ini juga mencerminkan adanya stigma. Anggapan bahwa mereka hanya berhak menerima simpati, tanpa diakui setara dalam masyarakat, dapat menegaskan harga diri dan identitas sosial mereka.

Rendahnya partisipasi penyandang disabilitas di masyarakat membuat mereka sering dianggap sebagai beban dan objek santunan (*charity*), yang pada akhirnya mendorong terjadinya eksklusi sosial. (Propiona et al., 2021). Ketika individu dengan disabilitas tidak terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, mereka kehilangan kesempatan untuk memperluas jaringan sosial, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan kualitas hidup. Hal ini bisa mengakibatkan pembatasan dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya dan peluang untuk terlibat sepenuhnya dalam kehidupan masyarakat.

Ketika individu dengan disabilitas hanya dipandang sebagai objek belas kasihan, kebutuhan dan potensi mereka sering diabaikan. Masyarakat cenderung melihat mereka hanya sebagai penerima bantuan dan tidak mempertimbangkan hak mereka untuk hidup secara mandiri, berkembang, dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Secara keseluruhan, pandangan negatif terhadap disabilitas sebelum adanya dukungan aksesibilitas tidak hanya memengaruhi kehidupan penyandang disabilitas secara individual, tetapi juga menghambat pembangunan sosial dan inklusi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengubah pandangan budaya tersebut melalui penyediaan dukungan aksesibilitas yang memadai, pendidikan, kesadaran, dan kebijakan inklusi yang mendukung.

Yakkum Emergency Unit (YEU) melaksanakan penyediaan aksesibilitas melalui proses yang terencana sesuai tahapan kegiatan pekerjaan sosial menurut Max Siporin (1997): *Engagement, Intake, Contract, Assessment, Planning, Intervention, Evaluation, dan Termination*. Pada tahap *Engagement, Intake, dan Contract*, YEU memperkenalkan diri kepada pemerintah desa, menjelaskan mandat, tujuan, dan peran mereka dalam merespons bencana serta melindungi kelompok rentan. Setelah itu, YEU dan lima desa binaan, termasuk Desa Ciputri, menandatangani surat komitmen kerja sama sebagai bentuk perjanjian untuk menjalankan program aksesibilitas.

Pendataan dan analisis kebutuhan aksesibilitas adalah langkah awal penting untuk memastikan layanan atau fasilitas dapat diakses oleh semua warga, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Langkah ini melibatkan penghapusan hambatan yang dihadapi oleh berbagai kelompok, sehingga YEU dapat merancang program atau kebijakan yang inklusif. Hal ini mungkin mencakup perbaikan infrastruktur, penerapan teknologi yang mendukung kebutuhan khusus, atau penyediaan layanan tambahan agar semua warga mendapatkan akses yang setara. YEU

juga melakukan evaluasi kondisi untuk mengidentifikasi kebutuhan aksesibilitas spesifik dan merencanakan intervensi yang efektif. Selain itu, pengakuan akan nilai kelekatan keluarga, khususnya antara anak dan orang tua, menjadi dasar bagi YEU dalam merancang layanan yang memperkuat interaksi positif, memungkinkan mereka berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bermanfaat bersama.

Berdasarkan hasil penilaian, YEU merencanakan tindakan untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas masyarakat. Mereka mengembangkan strategi yang sesuai, diikuti dengan implementasi rencana, seperti penyediaan lampu darurat, pemasangan pegangan tangan, pembuatan jalan landai, atau perbaikan kamar mandi. Setelah intervensi, YEU melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas program dan apakah tujuan telah tercapai. Jika kebutuhan belum sepenuhnya terpenuhi, YEU akan kembali ke tahap perencanaan atau intervensi. Penggunaan kuesioner PDM (Post Distribution Monitoring) dalam monitoring dan evaluasi menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas dan dampak dari program yang dilakukan. Melalui tahapan ini, YEU dapat memberikan aksesibilitas yang tepat sasaran dan tepat waktu.

Kuesioner PDM membantu YEU mengevaluasi kualitas program atau distribusi dengan mengumpulkan masukan dari pendamping Penerima Manfaat. Melalui kuesioner ini, YEU dapat menilai apakah distribusi berjalan baik, apakah barang atau layanan berkualitas, dan apakah prosesnya lancar. Kuesioner PDM juga memberi masyarakat kesempatan untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan pengalaman mereka, memastikan program lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Data dari kuesioner ini memungkinkan YEU untuk mengukur sejauh mana program atau distribusi mencapai tujuan dan memberikan manfaat yang diinginkan bagi masyarakat.

Menurut Max Weber, perubahan sosial terkait dengan kemajuan rasionalitas manusia (Martono, 2011: hlm. 47). Weber melihat bahwa evolusi rasionalitas memungkinkan manusia untuk secara objektif memeriksa kepentingan dan alasan di balik aktivitas sosial. Dalam teorinya, ia mengidentifikasi konsep rasionalisasi, yaitu proses di mana tindakan manusia dan struktur sosial semakin diatur oleh nilai-nilai rasional, tujuan yang diperhitungkan, dan pengetahuan sistematis. Dalam konteks perubahan sikap terhadap disabilitas, dukungan aksesibilitas membantu masyarakat mengadopsi pandangan yang lebih inklusif, mencerminkan peningkatan rasionalitas dalam norma sosial, di mana keberagaman lebih dihargai.

Perubahan sikap masyarakat terhadap disabilitas mencerminkan proses modernisasi dan rasionalisasi yang semakin mengedepankan nilai-nilai inklusif. Dukungan aksesibilitas oleh YEU, yang melibatkan penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan, menandai perubahan dari norma tradisional berbasis stigma menuju norma yang lebih rasional dan inklusif. Max Weber berpendapat bahwa birokrasi adalah bentuk organisasi yang paling efisien bagi kehidupan bersama, dan pelibatan penyandang disabilitas dalam aksesibilitas program juga mencerminkan birokratisasi. Pandangan ini sejalan dengan Santoso dan Apsari (2017: 169), yang menyatakan bahwa disabilitas kini dipahami sebagai masalah lingkungan, bukan sekedar masalah individu, menuntut kesetaraan akses bagi semua.

Menurut Max Weber, individualisasi adalah konsep yang menunjukkan bahwa tindakan sosial individu memiliki arti dan tujuan yang penting bagi dirinya sendiri serta ditujukan kepada orang lain (Pipi Susanti, 2020). Individualisasi juga merupakan bagian dari proses rasionalisasi, dimana individu menjadi lebih otonom dan memiliki lebih banyak kendali atas kehidupan mereka. Dalam konteks disabilitas, melibatkan penyandang disabilitas dalam mengambil keputusan dan memberikan aksesibilitas yang sesuai dengan representasi pengakuan terhadap mereka sebagai individu yang dapat menentukan kehidupan mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang dirinya sebagai bagian integral dari komunitas, bukan hanya sebagai objek belas kasih.

Setelah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ditingkatkan, terjadi perubahan signifikan dalam norma, nilai, dan pola perilaku masyarakat. Penyandang disabilitas kini lebih diterima sebagai bagian penting dari komunitas, bukan lagi dianggap sebagai beban atau objek belas kasihan. Mereka lebih dihargai sebagai individu yang memiliki hak yang setara dalam berpartisipasi di berbagai aspek kehidupan, termasuk kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Penyandang disabilitas kini lebih sering dilibatkan dalam aktivitas komunitas seperti acara sosial, budaya, dan bahkan tim siaga bencana, sehingga mereka tidak lagi terisolasi atau diabaikan.

Dukungan aksesibilitas yang memadai membuat masyarakat mulai menghargai potensi dan kemampuan penyandang disabilitas, melihat mereka bukan hanya dari keterbatasannya, tetapi juga dari bakat dan kontribusi yang dapat diberikan. Penyandang disabilitas semakin diakui sebagai mitra dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Mereka dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan

dengan kepentingan mereka, serta dalam perencanaan program-program untuk meningkatkan inklusi dan aksesibilitas.

Perubahan perilaku masyarakat turut mempengaruhi norma dan nilai yang dianut. Inklusi, keberagaman, dan kesetaraan kini dihargai sebagai nilai penting, dengan kesadaran bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas pun bertransformasi dari eksklusif dan diskriminatif menjadi inklusif dan mendukung. Ini menunjukkan langkah positif menuju terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua.

Fasilitas aksesibilitas yang memadai, seperti lampu darurat, handrail, ramp, dan kamar mandi yang disesuaikan, memudahkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan komunitas. Hambatan fisik berkurang, memungkinkan mereka lebih aktif dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, penerima manfaat ramp menjadi lebih mudah bersosialisasi dengan tetangga karena akses aman di halaman rumah. Dengan terpenuhinya kebutuhan aksesibilitas, penyandang disabilitas merasa diakui dan dihargai, yang meningkatkan rasa percaya diri serta harga diri, mendukung integrasi sosial yang lebih baik.

Peningkatan fasilitas aksesibilitas memudahkan penyandang disabilitas untuk berinteraksi dalam masyarakat, mengurangi rasa isolasi, dan memungkinkan mereka memperluas lingkaran sosial serta membangun hubungan yang lebih erat. Adanya aksesibilitas yang memadai dan pengakuan akan potensi mereka secara perlahan mengubah pandangan masyarakat, yang mulai melihat penyandang disabilitas sebagai anggota berharga dengan hak setara untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Integrasi sosial mereka pun meningkat, terlibat lebih aktif dalam berbagai aktivitas komunitas dan berkesempatan untuk berkembang. Secara keseluruhan, aksesibilitas yang ditingkatkan tidak hanya memperluas partisipasi aktif penyandang disabilitas, tetapi juga membantu mengubah sikap masyarakat, memperkuat integrasi, dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam kehidupan bersama.

Agen perubahan seperti YAKKUM Emergency Unit (YEU) memainkan peran penting dalam mengubah pandangan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. YEU memberikan dukungan konkret melalui fasilitas aksesibilitas, seperti lampu darurat, handrail, ramp, dan perbaikan kamar mandi. Selain itu, mereka aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya inklusi dan hak-

hak penyandang disabilitas melalui penyuluhan, pelatihan, dan kampanye kesadaran. Sebagai agen perubahan, YEU juga merancang dan mengimplementasikan program inklusi yang memungkinkan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik, memastikan mereka diakui sebagai bagian penting dari masyarakat dengan kesempatan setara untuk berkontribusi.

YAKKUM Emergency Unit (YEU) juga berperan aktif dalam advokasi kebijakan yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas, berupaya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. YEU bekerja sama dengan pemerintah, organisasi disabilitas, media, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong kebijakan yang mendukung aksesibilitas, kesetaraan, dan inklusi. Melalui upaya advokasi ini, YEU tidak hanya meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas secara langsung, tetapi juga membantu mengubah pandangan masyarakat, mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua individu.

Perubahan dalam struktur sosial yang mendukung partisipasi penyandang disabilitas setelah adanya dukungan aksesibilitas mencakup beberapa aspek penting. Adanya dukungan aksesibilitas, masyarakat mulai mengakui keberadaan penyandang disabilitas dan melibatkannya dalam berbagai kegiatan sosial. Mereka tidak lagi dianggap sebagai objek belas kasihan atau diisolasi dari masyarakat, tetapi diakui sebagai bagian yang berharga dan diterima dalam komunitas. Penyandang disabilitas yang sebelumnya dianggap tidak mampu atau tidak memiliki nilai dalam masyarakat, kini diakui memiliki potensi dan kontribusi yang berharga. Masyarakat mulai melihat mereka sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pekerjaan, kegiatan sosial, maupun pengambilan keputusan.

Konsep inklusi dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan semakin diakui sebagai aspek penting. Mereka kini dianggap sebagai bagian integral dalam tim tanggap darurat dan berbagai forum pengambilan keputusan di masyarakat, memberikan mereka kesempatan untuk berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program yang berdampak pada kehidupan mereka. Dengan adanya fasilitas aksesibilitas seperti lampu darurat, pegangan tangan, ramp, dan peningkatan fasilitas kamar mandi, penyandang disabilitas mendapatkan kemudahan akses ke tempat-tempat dan fasilitas umum. Hal ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam aktivitas sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Perubahan dalam struktur sosial serta mendorong pengembangan diri dan penyandang disabilitas. Mereka didorong untuk mengembangkan potensi, meningkatkan keterampilan, serta menjadi mandiri dalam menghadapi berbagai tantangan dan tantangan. Secara keseluruhan, perubahan ini mendukung partisipasi penyandang disabilitas dengan aksesibilitas yang lebih baik, sebagai langkah signifikan menuju masyarakat yang inklusif dan adil. Dengan memastikan akses yang setara bagi semua individu, termasuk penyandang disabilitas, terhadap kesempatan dan sumber daya, kita dapat membangun masyarakat yang lebih beragam, berdaya, dan berkeadilan.

Tanpa adanya dukungan aksesibilitas, masyarakat pada umumnya memiliki norma dan nilai yang menstigma penyandang disabilitas, membuat mereka cenderung ditolak dan dipandang sebagai objek belas kasihan. Namun, dengan adanya dukungan aksesibilitas dan penerapan konsep inklusi, norma dan nilai masyarakat mulai mengalami perubahan. Penyandang disabilitas kini diakui sebagai anggota masyarakat yang berharga dan mendapatkan akses yang setara terhadap berbagai fasilitas dan peluang. Lembaga seperti YAKKUM Emergency Unit berperan penting dalam menyediakan dukungan aksesibilitas di Desa Ciputri, dengan menyediakan lampu darurat, pegangan tangan, ramp, serta perbaikan kamar mandi. Unit Darurat YAKKUM tidak hanya memperbaiki infrastruktur fisik, tetapi juga mengubah pandangan budaya masyarakat terhadap disabilitas.

Upaya kampanye sosial yang dilakukan oleh YAKKUM Emergency Unit untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya inklusi dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dapat membantu mempercepat perubahan budaya. Melalui berbagai media dan kegiatan promosi, masyarakat diberikan informasi tentang hak-hak penyandang disabilitas dan pentingnya mendukung partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung penerimaan terhadap penyandang disabilitas. Dengan memperdalam pemahaman mengenai disabilitas dan hak-hak penyandang disabilitas melalui pendidikan formal maupun informal, masyarakat dapat lebih terbuka terhadap keberagaman. Program-program pendidikan dan kesadaran, seperti pelatihan dan lokakarya tentang inklusi dan aksesibilitas, berperan dalam mengubah pandangan budaya terhadap disabilitas menjadi lebih positif. Dukungan aksesibilitas serta upaya perubahan sosial yang dilakukan oleh berbagai pihak, seperti lembaga kemanusiaan,

media massa, dan program pendidikan, tidak hanya mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap disabilitas tetapi juga membuka lebih banyak peluang bagi partisipasi dan integrasi penyandang disabilitas

KESIMPULAN DAN SARAN

Pandangan budaya terhadap disabilitas fisik mengalami perubahan signifikan setelah YAKKUM Emergency Unit melakukan upaya menyediakan aksesibilitas. Sebelum adanya intervensi, masyarakat cenderung memiliki stigma dan persepsi negatif terhadap individu penyandang disabilitas fisik. Namun, setelah YAKKUM Emergency Unit memenuhi kebutuhan aksesibilitas di Desa Ciputri, terjadi peningkatan penerimaan dan inklusi sosial terhadap mereka. Peran YAKKUM Emergency Unit dalam menyediakan infrastruktur aksesibilitas memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup individu dengan disabilitas di komunitas tersebut. Kajian di Desa Ciputri ini memberikan wawasan penting mengenai bagaimana perubahan aksesibilitas dapat mempengaruhi pandangan budaya terhadap disabilitas fisik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyediaan aksesibilitas tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga membawa perubahan positif dalam dinamika sosial dan budaya di tingkat komunitas, memperkuat inklusi, dan mengurangi stigma terhadap penyandang disabilitas fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Goffman, E. (1963). *Stigma: notes on the management of spoiled identity*.
- Giddens, Anthony. (1979), *Central Problems in Social atau Problematika Utama dalam Teori Sosial: Aksi, Struktural, dan Kontradiksi dalam Analisis Sosial*, terjemahan Dariyatno. (2009), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Indraddin, & Irwan. (2016). *Strategi dan Perubahan Sosial*. Padang: STKIP PGRI Sumbar Press dan Magister Sosiologi FISIP UNAND.
- Macionis, John J. 2009. *Society: The Basic*. New Jersey: Pearson Education.
- Abdussamad, Z., Apripari, A., Muhtar, M. H., Ahmad, A., Bakung, D. A., & Imran, S. Y. (2023). Pendekatan Cultural Studies Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Boalemo. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 5272–5279.
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/16597>

- Agustanti, R. D., & Waluyo, B. (2023). *Keberadaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen 193 negara di dunia*. 7(5), 1–10.
- Artikel, I. (n.d.). *DI PIMPINAN CABANG NASYIATUL AISYIYAH KLATEN SELATAN Ratih Puspita Dewi, Wiwin Handitcianawati, dan Roby Hermawan Pendidikan Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta Email: rpd229@ums.ac.id PENDAHULUAN Gempa bumi (earthquake) adalah suatu fenome*.
- Ayu, E., Mustika, S., Hadi, E. N., Rofi, A., & Dewi, S. N. (2022). *Stigma Pekerja terhadap Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja Stigma of Workers towards Persons with Disabilities in the Workplace*. 4(2), 30–42. <https://doi.org/10.47034/ppk.v4i2.6318>
- Di Wiyono(2018). *AGAMA DAN INTERAKSI SOSIAL: Potret Harmoni Beragama Kabupaten Pesawaran Suhandi Universitas Islam Negeri RadenIntan Lampung Keywords: Religion, Social Interaction, Religious Harmony, Wiyono A. Pendahuluan Keinginan setiap agama dan manusia*. 13(2), 171–192.
- Didan Akbar Zaelani, & Ade Yunita Mafruhah. (2022). *Hak Memperoleh Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung di Masa Pandemi Covid-19. Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(2), 16–29. <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i2.4652>
- Hakim, A. (2021). *JURNAL KOMUNIKASI PROFESIONAL Adaptasi dan komunikasi mahasiswa asal papua dalam interaksi sosial di kota malang*. 5(5), 405–413.
- Indonesia, J. F., & Weber, M. (2023). *Peran Masyarakat Sosial dalam Agama Perspektif Max Weber dan Relevansinya Kemajuan Masyarakat*. 6(2), 189–196.
- Jauhari, A., & Indonesia, J. T. (n.d.). *Pendidikan inklusi sebagai alternatif solusi mengatasi permasalahan sosial anak penyandang disabilitas*.
- Muhammad Fadhil Al Faiq. (2021). *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah dan Berpendidikan*. 1(9), 299–305.
- Mumpuni, S. D., & Zainudin, A. (2018). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Tegal. Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 1(2). <https://doi.org/10.32585/jkp.v1i2.24>

- Norma, N. D. A. N., Membentuk, T., & Keguruan, F. (2023). *Nilai-nilai dan norma tradisional membentuk kategori masyarakat nasional dalam sosiologi pendidikan*. 3(2), 73–77.
- Novantri, A. C. (2023). *Membangun Interaksi Sosial Mahasiswa dengan Penyandang Disabilitas melalui Permainan Goyang Balon di Sentra Terpadu Temanggung*. 04, 27–36.
- Oliver, M. (1996). Understanding Disability. From Theory to Practice (Book). The Journal of Sociology and Social Welfare, 23(3), 118–119. <https://doi.org/10.1111/14679566.ep10934325>
- Pontianak, P. D. I. (n.d.). *Peran orang tua sebagai agen sosialisasi pendidikan dasar anak keluarga pemulung di pontianak*. 1–10.
- Propiona, J. K., Aksesibilitas, I., & Propiona, J. K. (2021). *PENYANDANG DISABILITAS*.
- Rohman, Y. F. (2019). Eksklusi Sosial dan Tantangan Penyandang Disabilitas Penglihatan terhadap Akses Pekerjaan. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 01(01), 51–66. www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS
- Sinaga, M. E., & Gulo, Y. (2020). Konseling Lintas Budaya dan Agama (Nilai-Nilai pada Masyarakat Suku Batak dalam Melakukan Pendampingan terhadap Disabilitas) Cross-Cultural and Religious Counseling (Values of Batak People in Assisting Disability) Penyandang Disabilitas atau Difabel. *Jurnal Antropologi Dan Budaya*, 5(2), 96–107.
- SOSIALISASI NILAI-NILAI KULTURAL DALAM KELUARGA Studi Perbandingan Sosial-Budaya Bangsa-Bangsa Jamal Syarif Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin Jalan A . Yani Km 4 . 5 Banjarmasin 70235*. (n.d.).
- Studi, P., Indonesia, S., Bahasa, D., Budaya, F. I., & Mada, U. G. (2018). *Representasi Unsur Budaya dalam Cerita Rakyat Indonesia : Kajian Terhadap Status Sosial dan Kebudayaan Masyarakat Abstrak Representation of Cultural Elements in Indonesian Folklore : A Study of the Social Status and Cultural of the Community Abstract Peng*. 3(3), 189–199.
- Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. *Inklusi*, 1(2), 269. <https://doi.org/10.14421/ijds.010208>